



PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DESA LUKU, KECAMATAN DOLO BARAT, KABUPATEN SIGI UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

**Irwan Waris¹, Ani Susanti², Muh. Nawawi³, Darwis⁴,
Irwansyah Kamindang⁵**

Email: irwanwaris@yahoo.co.id

Jurusan ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas Tadulako

Abstrak Keterlibatan masyarakat desa dalam proses politik merupakan salah satu indikator terciptanya demokrasi yang sehat. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat tentang politik seringkali menghambat partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi dengan tujuan memberikan pendidikan politik yang bersifat praktis dan aplikatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dalam bentuk kegiatan pelatihan yang berisi pemberian pengetahuan, diskusi kelompok, dan simulasi musyawarah desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban politik, kesadaran kritis terhadap isu-isu pemerintahan, serta partisipasi aktif dalam forum musyawarah desa dan diharapkan partisipasi aktif dan sikap kritis mereka terhadap Pemilu dan Pilkada. Dengan demikian dapat dikemukakan, kegiatan pendidikan politik terbukti efektif dalam mendorong terciptanya masyarakat yang partisipatif, kritis, dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: pendidikan politik, partisipasi masyarakat, demokrasi, Desa Luku

Pendahuluan

Pendidikan politik merupakan instrumen penting dalam proses demokratisasi, khususnya di tingkat lokal. Demokrasi yang sehat memerlukan masyarakat yang memiliki pemahaman politik memadai serta kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan (Surbakti, 2010). Pendidikan politik rakyat mestinya terus diupayakan. Pihak yang bertanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan tersebut tentu saja Adalah pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mestinya terus mengupayakan berbagai cara dan kegiatan yang memungkinkan kegiatan Pendidikan politik dirasakan oleh Masyarakat. Pemerintah juga harus memberi akses yang seluas-luasnya agar rakyat atau Masyarakat memperoleh Pendidikan politik, sehingga dari waktu ke waktu kualitas pengetahuan dan pemahaman politik rakyat semakin membaik. Tentu hal seperti itu diyakini dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik rakyat yang nantinya berujung pada meningkatnya kualitas kesertaan rakyat pada berbagai event politik yang

¹ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP UNTAD.

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP UNTAD.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP UNTAD.

⁴ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP UNTAD.

⁵ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP UNTAD.

berlangsung pada keseharian mereka. Jika hal itu dapat terwujud, itu berarti kualitas demokrasi akan membaik karena proses demokratisasi antara lain melalui Upaya sungguh=sungguh dari pemerintah melakukan Pendidikan politik terus berlangsung.

Selain pemerintah, pihak lainnya yang ikut bertanggung jawab Adalah kelompok-kelompok kepentingan yang dibentuk dan hidup serta beraktifitas mewakili Masyarakat. Kelompok kepentingan sejatinya membuat berbagai kegiatan secara terencana maupun insidental, secara langsung atau tidak langsung, menyangkut Pendidikan politik masyarakat ini. Mengapa demikian? Karena kelompok kepentingan harus peduli pada peningkatan kualitas demokrasi yang salah satu penandanya adalah rakyat memiliki kualitas pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman politik di mana hal tersebut diperoleh dari kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Tengah Masyarakat. Jika pengetahuan, pemahaman dan pengalaman politik Masyarakat kualitasnya baik, kualitas kerja kelompok kepentingan dalam melakukan interaksi dengan pemerintah (supra struktur politik) kualitasnya juga akan efektif dan efisien, sehingga kemampuan kelompok kepentingan itu mempengaruhi kebijakan pemerintah juga berlangsung efektif an efisien.

Seperti halnya kelompok kepentingan, partai politik juga bertanggung jawab terhadap pemberian Pendidikan politik yang berkualitas kepada rakyat. Bahkan tidak berlebihan jika dikemukakan, di negara yang menerapkan demokrasi yang berkualitas, Partai politiklah yang memegang peran paling penting atau krusial dalam membentuk pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman politik rakyat melalui kegiatan pendidikan politik, baik secara langsung dan terprogram maupun secara tidak langsung dan tidak terprogram.

Lembaga Pendidikan juga berperan dalam memberikan rakyat pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman politik melalui Pendidikan politik. Dalam hal ini perguruan tinggi misalnya memberikan edukasi politik secara terencana dan terprogram melalui proses perkuliahan pada program studi tertentu dan pemberian Pendidikan politik melalui berbagai kegiatan akademik seperti seminar, kongres, pelatihan, dan pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan yang dilakukan di Desa Luku ini merupakan bentuk keterlibatan perguruan tinggi di dalam mengambil peran pemberian edukasi politik kepada rakyat.

Kajian Pustaka

Sungguhpun berbagai pihak mestinya bertanggung jawab terhadap pemberian Pendidikan politik dan meningkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu, namun dalam kenyataannya peran berbagai pihak itu sungguh-sungguh terbatas untuk tidak mengatakan kurang. Sebagai akibatnya masyarakat di pedesaan seringkali menghadapi keterbatasan informasi dan pemahaman politik sehingga partisipasi mereka masih bersifat pasif dan transaksional di dalam berbagai event politik, antara lain kegiatan Pemilu, Pilkada, Pemilihan Kepala Desa, dan berbagai kegiatan voting lainnya (Haryanto, 2016).

**PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DESA LUKU, KECAMATAN DOLO BARAT,
KABUPATEN SIGI UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG PARTISIPATIF DALAM
KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA**

Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, merupakan salah satu desa yang memiliki dinamika sosial politik cukup tinggi. Namun, keterlibatan masyarakat dalam forum-forum pengambilan keputusan desa belum maksimal. Hal ini disebabkan minimnya pemahaman tentang hak politik, rendahnya literasi politik, serta adanya kecenderungan politik praktis yang elitis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pengabdian masyarakat melaksanakan kegiatan pendidikan politik dengan tujuan:

- (1) memberikan pemahaman mengenai konsep dasar politik dan demokrasi;
- (2) meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak dan kewajiban politik;
- (3) mendorong partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan proses pembangunan local, dan partisipasi aktif dan kritis pada proses Pemilu dan Pilkada.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama dua hari yaitu pada tanggal 20 dan 21 September 2025 di Desa Luku, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Peserta kegiatan adalah tokoh adat, perangkat desa, anggota Badan Perwakilan Desa, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Perempuan, dengan jumlah 41 (empat puluh satu) orang, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 01. Jumlah Peserta Pengabdian pada Masyarakat

No.	Pengelompokan Masyarakat	Jumlah Kesertaan
1.	Perangkat Desa	10
2.	Anggota BPD	10
3.	Tokoh Pemuda	10
3.	Tokoh Adat	6
4.	Tokoh Perempuan	5
	Jumlah :	41

Sumber : Data lapangan thn 2025.

Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Persiapan, yaitu koordinasi dengan pemerintah desa, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta penyusunan materi pendidikan politik. Kegiatan ini tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk membicarakan materi pelatihan yang diperlukan Masyarakat sehubungan dengan rencana pelatihan Pendidikan politik kaitannya dengan Upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah materi pelatihan disepakati, tim pengabdian membuat materi pelatihan berupa mowar point dan modul pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelatihan nantinya.

2. Pelaksanaan, melalui pemberian materi pelatihan berupa pemberian materi di ruang kelas, diskusi interaktif, dan simulasi musyawarah desa; Selanjutnya pelaksanaan pelatihan pada tanggal 20 dan 21 September 2025. Materi pelatihan yang telah disiapkan oleh tim pengabdian masing-masing disampaikan sesuai jadwal pelatihan selama dua hari tersebut. Peserta pelatihan diberikan materi berupa ceramah dan diskusi secara langsung (interaktif) dengan pemateri. Dalam hal ini diskusi berlangsung hangat dan lancar. Peserta pelatihan menanyakan berbagai hal terutama sesuai dengan pengalaman kesehariannya sebagai warga yang terlibat pada berbagai event politik. Selain diskusi sebagaimana dikemukakan di atas juga dilakukan simulasi musyawarah desa untuk memberi pengalaman kepada warga bagaimana sesungguhnya musyawarah yang mestinya dilakukan tersebut.
3. Evaluasi, melalui pre-test, post-test. Dalam rangka pelaksanaan pelatihan ini dilakukan evaluasi. Kegiatan tersebut dilakukan dalam bentuk pre-test dan post test. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta pelatihan sebelum dan setelah mereka mendapatkan materi. Hal itu juga dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan pelatihan. Pelatihan dinyatakan berhasil jika pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan lebih baik setelah pemberian materi pelatihan sebagaimana hal itu dapat dilihat pada evaluasi post-test.

Dalam hal itu, metode atau pendekatan pelatihan yang digunakan adalah partisipatif (*participatory approach*), dengan menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Desa Luku

Desa Luku merupakan salah satu dari dua belas desa yang berada di wilayah Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, Desa Luku memiliki luas wilayah sekitar 1,41 km², menjadikannya salah satu desa dengan luas wilayah terkecil di Kecamatan Dolo Barat.

Kondisi geografis wilayah Kecamatan Dolo Barat secara umum merupakan wilayah persawahan dan dataran tinggi perbukitan yang terhampar di kiri dan kanan jalan poros Palu–Bangga. Dengan karakteristik tersebut, Desa Luku juga memiliki kontur tanah yang relatif bervariasi antara dataran dan perbukitan rendah, serta didominasi oleh lahan pertanian dan pemukiman penduduk.

Letak Desa Luku yang strategis di jalur utama Palu–Bangga membuatnya mudah dijangkau dari pusat kecamatan maupun ibu kota kabupaten. Kondisi alam yang subur menjadikan sektor pertanian dan perkebunan rakyat sebagai salah satu penopang utama kehidupan masyarakat desa.

Berdasarkan data Kecamatan Dolo Barat, jumlah penduduk Desa Luku mencapai sekitar 667 Jiwa yang tersebar di 3 Dusun dan 6 RT terdiri dari 345 Laki-laki dan 322 Perempuan.

Meskipun memiliki wilayah yang relatif kecil, Desa Luku memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan beberapa desa lain di Kecamatan Dolo Barat.

Penduduk Desa Luku terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan perbandingan yang seimbang. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, sementara sebagian lainnya berprofesi sebagai pegawai negeri, pedagang, atau pelaku usaha kecil.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Desa Luku hidup dalam suasana kekeluargaan yang kuat, menjunjung tinggi nilai gotong royong, serta aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

2. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk pelatihan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 20 dan 21 September 2025. Peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 41 orang, diambil dari tokoh Masyarakat yang diajukan oleh Kepala Desa Luku berdasarkan ketokohan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 01 di atas.

Secara umum dapat dikemukakan, peserta kegiatan sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Materi pelatihan yang disampaikan oleh tim pengabdian yang dalam hal ini bertindak sebagai instruktur pelatihan mendapatkan perhatian dan tanggapan serius dari peserta. Setiap dibuka sesi tanya jawab peserta aktif bertanya dan berdiskusi dengan instruktur maupun dengan antar peserta. Demikian pula dengan simulasi yang dilakukan, yaitu simulasi musyawarah desa, diikuti oleh peserta dengan tekun, serius, dan tetap bergembira. Hal itu disebabkan instruktur pelatihan menyampaikan materi secara baik. Para instruktur pelatihan itu sekaligus juga sebagai tim pengabdian merupakan para pakar dibidangnya masing-masing sehingga mereka mampu membawakan materi secara baik dan menyenangkan peserta.

3. Hasil Evaluasi Kegiatan

3.1. Berdasarkan hasil evaluasi, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai konsep politik, demokrasi, serta hak dan kewajiban politik warga negara. Hasil pre-test menunjukkan hanya 40% peserta yang memahami hak politik dasar, sedangkan pada post-test meningkat menjadi 85%.

3.2. Kesadaran Kritis terhadap Isu Pemerintahan melalui diskusi kelompok, peserta mulai menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan desa, termasuk dalam hal

transparansi dana desa dan mekanisme musyawarah. Kesadaran kritis ini menjadi modal penting dalam membangun masyarakat yang demokratis.

- 3.3. Peningkatan Partisipasi dalam Musyawarah Desa. Simulasi musyawarah desa memberikan dampak positif terhadap kepercayaan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Hal ini terlihat dalam simulasi musyawarah desa, di mana partisipasi warga yang mengemukakan pendapatnya meningkat sebesar 60% dibandingkan sebelumnya.
- 3.4. Implikasi Akademik dan Praktis. Secara akademik, kegiatan ini memperkuat teori partisipasi politik yang menyatakan bahwa pendidikan politik berperan signifikan dalam meningkatkan keterlibatan warga (Verba, Schlozman, & Brady, 1995). Secara praktis, kegiatan ini membuktikan bahwa pendidikan politik di tingkat lokal dapat menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat demokrasi desa.

Kesimpulan

Kegiatan pendidikan politik di Desa Luku berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran kritis, dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa menunjukkan peningkatan yang signifikan, menandakan terciptanya masyarakat yang lebih demokratis dan berdaya. Ke depan, program pendidikan politik perlu dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan berbagai aktor lokal agar partisipasi masyarakat semakin kokoh.

Daftar Pustaka

- Haryanto. (2016). Partisipasi Politik Masyarakat Desa dalam Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surbakti, R. (2010). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.
- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.